



BADAN
PANGAN
NASIONAL

NATIONAL
FOOD
AGENCY

LAPORAN JANUARI

2025

DEPUTI BIDANG KERAWANAN
PANGAN DAN GIZI

KATA PENGANTAR

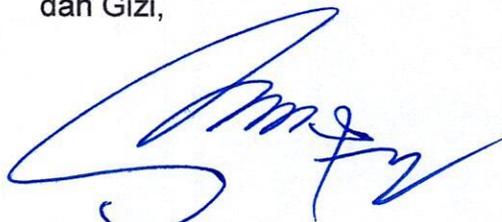
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt. atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Bulanan Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bulan Januari Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan bulanan disusun untuk memberikan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, Laporan Bulanan merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional.

Laporan Bulanan ini berisi tentang laporan realisasi pencapaian output fisik dan realisasi penyerapan anggaran setiap akhir bulan berjalan dan disusun sebagai laporan kinerja lingkup Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi referensi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan berikutnya.

Jakarta, Februari 2025

Pj. Deputy Bidang Kerawanan Pangan
dan Gizi,



Dr. Drs. Sarwo Edhy, S.P., M.M., M.H.
NIP. 196203221983031001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTARGAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	2
1.3. Metodologi Penyusunan Laporan.....	2
BAB II RENCANA KINERJA OUTPUT.....	3
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN.....	5
3.1. Realisasi Fisik dan Keuangan.....	5
3.2. Monitoring Kegiatan Prioritas.....	7
BAB IV PENUTUP.....	16
4.1. Kesimpulan.....	16
4.2. Permasalahan.....	16
4.3. Langkah Perbaikan (Rekomendasi).....	16



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Fisik dan Keuangan Bulan Januari sesuai DIPA Revisi Badan Pangan Nasional (sesuaikan target dan pagu anggaran dengan file laporan realisasi januari) ...3	3
Tabel 2. Realiasi Fisik dan Keuangan Bulan Januari 2025 Per Output dan Komponen Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi (sesuaikan target dan pagu anggaran dengan file laporan realisasi januari).....5	5



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. NFA Dukung Potensi Kerjasama Atasi Susut dan Sisa Pangan Dengan Jepang	11
Gambar 2. Partisipasi pada rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri	14
Gambar 3. Partisipasi pada pertemuan follow up Country Focus Training on Nutrition and School Meal yang diselenggarakan oleh JICA Indonesia	15



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49), Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Direktorat Kewaspadaan Pangan menyelenggarakan fungsi: a. Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi; b. Pengendalian Kerawanan Pangan c. Pengadaan dan Pengelolaan dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana d. Pengawasan dan pemenuhan persyaratan gizi pangan; e. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerawanan pangan dan gizi e. Pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan di bidang kerawanan pangan dan gizi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala. Selain itu, pelaksanaan tugas dan fungsi kerawanan gizi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Hasil dari pemantauan dan evaluasi serta bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran selama bulan Januari Tahun 2025 dituangkan dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan di Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi posisi bulan Januari tahun 2025. Laporan ini merupakan catatan rekaman realisasi fisik dan keuangan selama bulan Januari Tahun 2025 serta hasil evaluasi menuju perbaikan kualitas pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan. Ruang lingkup laporan ini mencakup keseluruhan output lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi baik fisik



maupun keuangan. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberi informasi tentang hasil pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan dan Direktorat Kewaspadaan Pangan di tahun berjalan. Laporan ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi pada periode pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

1.2. Tujuan

1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan melalui realisasi fisik dan keuangan lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi pada bulan Januari 2025.
2. Melakukan pemantauan terhadap realisasi fisik dan keuangan, berdasarkan target pada bulan Januari 2025

1.3. Metodologi Penyusunan Laporan

1. Mengumpulkan data dan informasi target dan capaian fisik dan keuangan.
2. Menganalisis data target fisik dan keuangan berdasarkan lembar ke-III DIPA dengan data realisasi fisik dan keuangan berdasarkan aplikasi SAKTI.
3. Menyajikan hasil analisis dalam laporan.



BAB II RENCANA KINERJA OUTPUT

Rencana kinerja output merupakan pencapaian dari sasaran strategis dan indikator kinerja Badan Pangan Nasional selama tahun 2025. Rencana kinerja output pada bulan Januari tahun 2025 akan dilihat dari dukungan pencapaian output/RO dan komponen sebagaimana target sesuai lembar III DIPA Revisi pada bulan Januari Tahun 2025. Pada dokumen tersebut pada bulan Januari ditargetkan sebesar 0,07%. Target tersebut sebagaimana tersaji pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Target Fisik dan Keuangan Bulan Januari sesuai DIPA Revisi Badan Pangan Nasional (sesuaikan target dan pagu anggaran dengan file laporan realisasi januari)

Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen			Alokasi Tahun 2025		Target Bulan Januari Tahun 2025	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/Output	Komponen	Anggaran	Fisik	Keuangan (0,07%)	Fisik
HA-Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas						
6876 Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemanapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi						
AEA - Koordinasi	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	3.981.760.000	1 kegiatan	2.787.232	0
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	Penyusunan NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	400.000.000	4 NSPK	280.000	0
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	1.600.000.000	1 rekomendasi kebijakan	1.120.000	0
QEC-Bantuan Produk	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan	Penyaluran Bantuan Pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan	10.000.000.000	36.000 paket	7.000.000	0
QEC-Bantuan Produk	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan	Penyaluran Bantuan Pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan	8.400.000.000	28.800 paket	5.880.000	0



Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen			Alokasi Tahun 2025		Target Bulan Januari Tahun 2025	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/Output	Komponen	Anggaran	Fisik	Keuangan (0,07%)	Fisik
QEC-Bantuan Produk	Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi	Penyaluran Bantuan Pangan terfortifikasi	583.200.000	1.944 paket	408.240	
QMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	1.000.000.000	1 Data	700.000	0
AEA-Koordinasi	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	2.352.505.000	1 Kegiatan	1.646.754	0
PAD-Peraturan Presiden	RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)	Penyusunan RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)	169.825.000	1 RPerpres	118.878	0
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	1.943.429.000	5 rekomendasi kebijakan	1.360.400	1
QMA – Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Penyelamatan pangan	Data dan Informasi Penyelamatan pangan	3.111.500.000	1 Data	2.178.050	0
QMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	336.930.000	1 Data	235.851	0
RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	Fasilitasi sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	3.388.005.000	5 Unit	346.836	0



BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Realisasi Fisik dan Keuangan

Sesuai dengan DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2025, Anggaran Deputi Bidang Kerawanan Pangan terdapat di masing-masing eselon 2 yaitu Direktorat Kewaspadaan Pangan memiliki 5 output/RO dengan pagu anggaran pusat sebesar Rp. 8.409.069.000.- dan Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan akan melaksanakan 5 (lima) KRO yang terdiri dari 6 output/RO dengan pagu anggaran sebesar Rp26.323.000.000,- untuk mendukung capaian kinerja kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemanjapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Realisasi keuangan pada bulan Januari Tahun 2025 diperoleh dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan. Realisasi fisik dan keuangan per output seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Januari 2025 Per Output dan Komponen Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi (sesuaikan target dan pagu anggaran dengan file laporan realisasi januari)

Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen			TARGET (0,07%)		REALISASI	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/Output	Komponen	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik
6876 Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemanjapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi						
AEA - Koordinasi	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	2.787.232	1 kegiatan	0	0
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	Penyusunan NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	280.000	4 NSPK	0	0
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	1.120.000	1 rekomendasi kebijakan	0	0
QEC-Bantuan Produk	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan	Penyaluran Bantuan Pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan	7.000.000	36.000 paket	0	0



Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen			TARGET (0,07%)		REALISASI	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/Output	Komponen	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik
QEC-Bantuan Produk	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan	Penyaluran Bantuan Pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan	5.880.000	28.800 paket	0	0
QEC-Bantuan Produk	Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi	Penyaluran Bantuan Pangan terfortifikasi	408.240	1.944 paket		
QMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	700.000	1 Data	0	0
AEA-Koordinasi	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	1.646.754	0	0	0
PAD-Peraturan Presiden	RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)	Penyusunan RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)	118.878	0	0	0
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	1.360.400	1	0	0
QMA – Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Penyelamatan pangan	Data dan Informasi Penyelamatan pangan	2.178.050	0	0	0
QMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	235.851	0	0	0



Berdasarkan realisasi fisik dan keuangan pada output/RO dan komponen lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi bulan Januari Tahun 2025 sebagaimana tabel di atas, realisasi anggaran berdasarkan aplikasi SAKTI mencapai Rp. 0.- atau 0% dari alokasi anggaran selama Tahun 2025 sebesar Rp. 34,732,069,000 Sedangkan jika dibandingkan dengan target bulan Januari Tahun 2025 sebesar Rp. 5.886.768,- realisasi mencapai 0% untuk Direktorat Kewaspadaan Pangan sedangkan untuk Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan 0% dari target Rp. 18.175.472, alokasi anggaran pada lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi masih di bintang atau di blokir Kementerian Keuangan. Pemblokiran tersebut disebabkan karena terjadinya perubahan organisasi Badan Pangan Nasional khususnya Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi yang sebagian tugas dan fungsi terkait gizi berpindah ke Badan Gizi Nasional, sementara proses perubahan SOTK masih dalam proses.

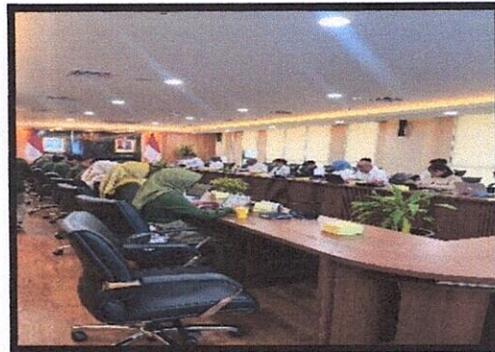
3.2. Monitoring Kegiatan Prioritas

Selama bulan Januari 2025, beberapa kegiatan yang telah dilakukan lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi sebagai berikut:

3.2.1. Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan

Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan melaksanakan 6 output yaitu: 1) Koordinasi Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan; 2) NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan; 3) Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan; 4) Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan(Bantuan Pangan untuk Masyarakat Terdampak Bencana dan Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan) ; 5) Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi 6) Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan. dengan alokasi anggaran pusat sebesar Rp. 25.964.960.000 (Dua Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan anggaran dekonsentrasi di daerah sebesar Rp1.900.000.000. (Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah).

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan bulan Januari 2025:



➤ **Rapat Koordinasi Teknis Penyiapan Rancangan Inpres tentang Optimalisasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (OPKE)**

- Rapat Pendahuluan Penyiapan Rancangan Inpres tentang Optimalisasi Pelaksanaan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sesuai disposisi Bapak Sestama yang dilaksanakan pada Jumat, 10 Januari 2025 di R. Rapat Kemenko PM/PMK. Pertemuan dibuka dan dipimpin oleh Deputi II Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PM, dihadiri oleh Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, Kemenko IPK, Kemenko Pangan, TNI, Polri, dan K/L terkait lain. Payung hukum pelaksanaan upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, yaitu Inpres Nomor 4 Tahun 2022 telah berakhir masa berlakunya pada 31 Desember 2024, sehingga diperlukan pemutakhiran dengan Inpres yang baru.

Selain itu juga karena: 1) Perubahan nomenklatur K/L, 2) sebagai Landasan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di daerah yang memastikan konvergensi berbagai program antara pusat dan daerah, dan 3) Perubahan dasar perhitungan garis kemiskinan ekstrem dari USD 1,9 PPP menjadi USD 2,15 PPP yang berpotensi meningkatkan garis kemiskinan.

- Rapat dilaksanakan pada Jumat, 22 Januari 2025 di R. Rapat Kemenko PM; dengan tujuan Merumuskan RInpres Optimalisasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pertemuan dibuka oleh Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan Kemenko PM yang selanjutnya dipimpin oleh Karo Hukum Organisasi dan Persidangan Kemenko PM, serta dihadiri oleh Kemenko Perekonomian, Kemenko PM, Kemenko IPK, Kemenko Pangan, TNI, Polri, dan K/L terkait lain yang tergabung dalam 36 K/L dengan Tusi PKE.

Langkah strategis dalam pelaksanaan OPKE, yaitu:

Prioritas pengentasan kemiskinan yang termuat dalam program prioritas Asta Cita, target angka kemiskinan ekstrem 0% pada akhir 2026.



Perubahan standar garis kemiskinan ekstrem dari USD1,9 PPP menjadi USD2,15 PPP.

Landasan hukum yang kuat bagi Pemda melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam rangka optimalisasi PKE.

Berakhirnya masa berlaku Inpres No.4 Tahun 2022 sebagai landasan hukum pelaksanaan upaya PPKE dan perlunya sinkronisasi tuisi K/L karena ada perubahan nomenklatur.

Inpres Optimalisasi PKE ditargetkan selesai sebelum Maret 2025, sehingga Kepala Daerah yang baru dilantik dapat mengsinergikan OPKE ke dalam RPJMD.

Bappenas mendorong agar Inpres diperluas tidak hanya menysasar kemiskinan ekstrem, tetapi juga kemiskinan absolut, sehingga semakin banyak K/L yang bersinergi dalam pencapaian target. Dengan adanya Rancangan Inpres tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN), maka Inpres Optimalisasi PKE harus sinkron, agar tidak terjadi dualisme data.

Perubahan tuisi dalam rangka OPKE dilakukan untuk 12 K/L, disesuaikan dengan tuisi yang tercantum dalam Perpres yang mendasari berdirinya K/L. Dalam Rancangan Inpres Optimalisasi PKE poin 32 terkait Tuisi Badan Pangan Nasional telah tepat, yaitu Kepala Badan Pangan Nasional mendapatkan mandat untuk melaksanakan program cadangan pangan pemerintah dan ketahanan pangan masyarakat miskin ekstrem. Mandat tersebut telah sejalan dengan program kerja Bapanas yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 dan Renstra Bapanas serta didukung dengan aspek legal, yaitu Perpres 125/2022 tentang CPP dan Perpres 81/2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.

Dengan keterlibatan Bapanas dengan Tuisi sebagaimana tertuang dalam RInpres OPKE tersebut akan memperkuat fungsi Bapanas dalam Penguatan CPP dan Ketahanan Pangan.

Tindak lanjut yang akan dilakukan, yaitu K/L yang akan menyampaikan perubahan substansi Rancangan RInpres kepada Kemenko PM maksimal pada M3 Januari 2025. Selanjutnya, RInpres yang telah disepakati oleh masing2 K/L selanjutnya akan diserahkan kepada SetNeg untuk ditinjau dan ditandatangani oleh Presiden.



3.2.2. Kegiatan Direktorat Kewaspadaan Pangan

Direktorat Kewaspadaan Pangan melaksanakan 6 output yaitu: 1) Koordinasi Mendukung Penyelamatan Pangan; 2) RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP); 3) Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan; 4) Data dan Informasi Penyelamatan Pangan; 5) Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan 6) Sarana Prasarana Upaya Penyelamatan Pangan. Alokasi anggaran pusat yaitu sebesar Rp. 8.409.069.000,-.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan bulan Januari 2025:

1. NFA Dukung Potensi Kerjasama Atasi Susut dan Sisa Pangan Dengan Jepang.

Rancangan RPJMN 2025-2029 yang menjadikan Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan (SSP) sebagai salah satu kegiatan prioritas di bawah Program Prioritas Ekosistem Ekonomi Sirkular pada Prioritas Nasional ke-2 merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam upaya pencegahan dan pengurangan SSP.

Hal tersebut diungkapkan oleh Pejabat Pelaksana Kegiatan Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Nita Yulianis pada seminar “Indonesia-Japan Circular Economy Development in Waste Management Including Food Loss and Waste” yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

“Penyelamatan Pangan menjadi salah satu indikator untuk pencapaian target nasional dalam menurunkan susut dan sisa pangan, hal ini tentunya menjadi potensi untuk dapat dikerjasamakan dengan Pemerintah Jepang” papar Nita. Pada kesempatan tersebut Nita juga menyampaikan bahwa NFA terus berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya upaya mengurangi pemborosan pangan melalui Gerakan Selamatkan Pangan.

“Upaya pencegahan pemborosan pangan dibutuhkan keterlibatan multi stakeholder, untuk selanjutnya perlu terus digiatkan dengan mendorong peran serta masyarakat agar dapat merubah perilaku boros pangan” ungkap Nita.

Sementara itu Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan Rofi Alhanif yang membuka kegiatan tersebut mewakili Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyampaikan bahwa seminar ini dilaksanakan sebagai tindaklanjut



dari kunjungan Perdana Menteri Jepang ke Presiden RI, membahas potensi kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Jepang. “Seminar ini diharapkan dapat memperkuat urgensi penanganan susut dan sisa pangan sebagai potensi yang bisa dikerjasamakan dengan pemerintah Jepang,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Jepang Yutaka Matsuzawa menyampaikan bahwa kerja sama pemerintah Indonesia dan Jepang di bidang lingkungan hidup sudah berjalan intens, khususnya dalam pengelolaan limbah dan mengatasi sampah laut telah membuahkan hasil yang nyata melalui peningkatan kapasitas melalui seminar, training, pertukaran kunjungan, dan mendorong investasi dalam pengelolaan limbah.

Turut hadir pada seminar tersebut oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Atase Lingkungan Hidup Kedutaan Besar Jepang, Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, perwakilan dari beberapa kementerian seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata serta Bappeda Jawa Barat, dan mitra lainnya.



Gambar 1. NFA Dukung Potensi Kerjasama Atasi Susut dan Sisa Pangan Dengan Jepang



2. Partisipasi pada rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri

Badan Pangan Nasional berpartisipasi dalam rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri tanggal 20 Januari 2025 di Jakarta. Rakor dipimpin oleh Mendagri dan dihadiri oleh Menkes, Plt Kepala BPS, Deputi KSP, Dirjen Kemendag, dan Direktur Bapanas secara offline dan dihadiri online oleh SAM Pertanian, Staf Ahli Panglima TNI, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Satgas Pangan Polri serta Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia. Pada rakor ini juga disampaikan secara khusus mengenai Sosialisasi Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) oleh Menkes.

Menkes menyampaikan PKG merupakan PHTC ke-2 dari 8 PHTC/Quick Win Presiden RI. Program ini akan menjangkau seluruh Masyarakat Indonesia. Masyarakat umum akan diperiksa di puskesmas tiap tanggal ulang tahun. Anak sekolah (6-18 tahun) diperiksa tiap tahun ajaran baru di sekolah. Launching PKG direncanakan pada M2 atau M3 bulan Februari 2025. Pada tahap awal ini akan dilakukan pematangan persiapan dengan seluruh Kepala Daerah untuk pelaksanaan PKG.

Mendagri menyampaikan bahwa sudah diterbitkan Surat Edaran Mendagri kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota, nomor 400.5.2/290/SJ tanggal 19 Januari 2025 tentang Dukungan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis. Mendagri mendorong pemda menyukseskan PKG karena dapat menjadi dasar kebijakan ke depan. Mendagri juga mendorong Pemda untuk membuat tata ruang terbuka hijau untuk mendukung pola hidup sehat.

Terkait dengan inflasi, tren tingkat inflasi per Desember 2024 sebesar 1,57%. Ada 14 provinsi dengan nilai inflasi diatas nasional yaitu Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat, Bali, Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Banten dan Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua, Kalimantan Barat, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Plt. Sekjen Kemendagri menyampaikan untuk upaya mengendalikan harga minyak goreng, Kemdagri menugaskan pemda untuk mengecek harga minyakita



ke distributor (D2) dan pasar. Terkait harga cabai merah dan cabai rawit, Kemendagri mengajak Pemda untuk mengencarkan kembali gerakan tanam cabai.

Plt. Kepala BPS menyampaikan secara umum inflasi Januari masih terkendali dengan komoditas andil inflasi diantaranya beras, cabai rawit, daging ayam ras dan Ikan segar. Komoditas penyumbang andil kenaikam IPH di Sebagian besar provinsi adalah cabe rawit, cabe merah, dan daging ayam ras.

Deputi Perekonomian KSP menyampaikan masih terdapat disparitas harga pangan antar daerah (Rendah, Sedang, Tinggi) yang dipetakan ke dalam 3 kategori yakni Status Harga (aman, waspada dan tidak aman), dengan irisan yakni aman (harga GKP tk. Petani dan daging ayam ras), waspada (daging sapi, gula pasir curah, beras medium zona 1 dan 2, telur ayam, bawang merah dan jagung tk. peternak) dan tidak aman (minyakita, beras medium Zona 3, bawang putih dan cabai rawit merah).

Pj Kewaspadaan Pangan Bapanas menyampaikan terdapat 48 Kab/Kota dengan harga Beras tingkat Penggilingan di bawah HPP. Untuk cabe rawit merah, terdapat 361 kab/kota di atas HAP, sedangkan bawang putih terdapat 413 kab/kota di atas HAP. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional dalam menjaga inflasi, pengendalian kemiskinan ekstrem, pengentasan stunting, serta stabilisasi pasokan dan harga , antara lain Optimalisasi Penyaluran Beras SPHP, Penyaluran Bantuan Pangan Beras, Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) dan Pengembangan Kios Pangan.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag menyampaikan bahwa Kemendag mengeluarkan surat edaran tentang pemasangan banner/sapnduk HET minyakita sebesar Rp. 15.700/liter di tiap pasar rakyat, meminta TPID melakukan pemantauan harga di distributor dan pengecer serta meminta seluruh Dinas Perdagangan untuk memfasilitasi pendaftaran penjualan minyakita di aplikasi SIMIRAH.

Tindak Lanjut:1) Kemenkes dan Dinas Kesehatan perlu memastikan pelaksanaan screening utk seluruh masyarakat berjalan lancar; 2)Kemendag dan Dinas Perdagangan perlu memastikan harga minyak kita sesuai dengan ketentuan;dan 3) Bapanas, Dinas Pangan dan Perum BULOG perlu memastikan penyerapan Gabah/Beras dengan harga dibawah HPP.



Gambar 2. Partisipasi pada rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri

3. Partisipasi pada pertemuan follow up Country Focus Training on Nutrition and School Meal yang diselenggarakan oleh JICA Indonesia

Badan Pangan Nasional berpartisipasi dalam pertemuan follow up Country Focus Training on Nutrition and School Meal yang diselenggarakan oleh JICA Indonesia pada tanggal 30 Januari 2025 di Jakarta. Pertemuan dipimpin oleh Senior Advisor dari JICA HQ Tokyo. Ms. Marika Nomura, P.hD dan dihadiri oleh Direktur Kesehatan Gizi Masyarakat Bappenas serta partisipan pelatihan JICA 2024 unsur Kemenkes, Bappenas, Bapanas dan SEAMEO RECFON. Pertemuan bertujuan untuk mempersiapkan Country Focus Training yang akan dilaksanakan Bulan Mei 2025 serta rencana pengiriman expert dari JICA HQ yang akan ditempatkan di Badan Gizi Nasional pada bulan Agustus 2025

Beberapa hal yang disampaikan dalam pertemuan sebagai berikut: 1) Bappenas menyampaikan framework pelaksanaan MBG dan saat ini sedang menyusun Draft Inpres Percepatan Pemenuhan Gizi Nasional yang mengatur kolaborasi 16 K/L termasuk bapanas; 2) Kemenkes menyampaikan telah membuat Pedoman Standar Gizi dan Makanan Program Makan Bergizi Gratis serta melakukan sosialisasi kepada stakeholder pada Desember 2024. Selain itu juga dibuat SOP terkait sanitasi dan higienitas penyelenggaraan MBG dan 3) Bapanas



menyampaikan dukungan terhadap program MBG, salah satunya adalah Gerakan Selamatkan Pangan melalui sosialisasi stop boros pangan bagi siswa penerima manfaat

Beberapa topik pelatihan CFT 2025 yang diusulkan partisipan antara lain: a) Manajemen Keamanan Pangan; b) Edukasi gizi; c) Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan; d) Pengawasan keamanan pangan dan higienitas; e) Manajemen Food Waste dan materi edukasinya bagi siswa dan f) Manajemen pembiayaan school lunch dari Pemda dan modalitas lainnya.



Gambar 3. Partisipasi pada pertemuan follow up Country Focus Training on Nutrition and School Meal yang diselenggarakan oleh JICA Indonesia



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan Deputi Bidang Kerawanan Pangan bulan Januari 2025 sebagai berikut:

1. Terdapat 1(satu) kegiatan terdiri dari 5 KRO dan 6 output/RO berdasarkan DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.964.960.000,- untuk mendukung capaian kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas.
2. Terdapat 6 output yaitu: 1) Koordinasi Mendukung Penyelamatan Pangan; 2) RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP); 3) Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan; 4) Data dan Informasi Penyelamatan Pangan; 5) Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan 6) Sarana Prasarana Upaya Penyelamatan Pangan. Alokasi anggaran pusat yaitu sebesar Rp. 8.409.069.000,-.
3. Realisasi Keuangan dan Fisik dari masing-masing Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Kewaspadaan Pangan masih 0% karena anggaran masih diblokir dan kegiatan masih dalam tahap persiapan.

4.2. Permasalahan

Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Kewaspadaan Pangan selama Bulan Januari 2025 belum dapat berjalan karena seluruh anggaran masih dalam proses buka blokir.

4.3. Langkah Perbaikan (Rekomendasi)

Perlu menyusun rencana kegiatan dan rencana penyerapan anggaran untuk mempercepat realisasi keuangan dan fisik pada bulan berikutnya ketika anggaran sudah dibuka blokir.